

Evaluasi Faktor Ekonomi dan Sosial dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Seruyan

Dicky Perwira Ompusunggu¹, Jamillullah², Juhi Chawala³, Adinda Aulia hafsari⁴, Kristina Ringka⁵,
Friady⁶, Mikarter Wendra⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Palangka Raya

Corresponding Author: Jamillullah, E-Mail: Jamillassegaf07@gmail.com

Published: July, 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis secara mendalam berbagai faktor yang memengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, serta mengevaluasi sejauh mana variabel ekonomi dan sosial berkontribusi terhadap optimalisasi pendapatan pajak. Penelitian ini menerapkan metode regresi linier berganda dalam pendekatan kuantitatif untuk menganalisis hubungan antar variabel secara sistematis dalam kurun waktu 14 tahun 2011 – 2024, yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Disporaparbud Kab. Seruyan. Jenis data penelitian berupa data sekunder, yakni Realisasi Pajak Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Tingkat Kemiskinan, Jumlah Penduduk dan Jumlah Wisatawan. Hasil uji t dan F mengindikasikan bahwa setiap variabel tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Seruyan, dengan nilai signifikansi yang melebihi 5% dan t hitung lebih kecil dari t tabel (2,306). Sementara itu, nilai R Square sebesar 0,570 menunjukkan kontribusi variabel-variabel tersebut sebesar 57,0%, sedangkan 43,0% dipengaruhi oleh faktor lain di luar cakupan model yang diteliti. Hal ini mengindikasikan bahwa penerimaan pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor selain aspek ekonomi yang diuji tetapi bisa dipengaruhi oleh kebijakan fiskal, tren investasi, dan dinamika sosial yang lebih luas.

Kata kunci: Regional Tax, PDRB, Inflation, Population, Tourists.

ABSTRACT

The objective of this study is to analyze various factors influencing regional tax revenue in Seruyan Regency, Central Kalimantan, and assess the extent to which economic and social variables contribute to optimizing tax income. This research employs a quantitative approach using the multiple linear regression method over a 14-year period (2011–2024), with data sourced from the Central Bureau of Statistics and the Department of Youth, Sports, Tourism, and Culture of Seruyan Regency. The study utilizes secondary data, including Regional Tax Realization, Economic Growth, Inflation, Poverty Rate, Population, and Number of Tourists. The results of the t-test and F-test indicate that none of the variables have a significant impact on regional tax revenue in Seruyan Regency, as their significance values exceed 0.05 and t-values are lower than the t-table value (2,306). Meanwhile, the R Square value of 0.570 suggests that these variables contribute 57.0% to regional tax revenue, while the remaining 43.0% is influenced by other factors beyond the model. This finding highlights that regional tax revenue is not solely dependent on the analyzed economic factors but is also affected by fiscal policies, investment trends, and broader socio-economic dynamics.

Keywords: Regional Tax, PDRB, Inflation, Population, Tourists.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Pendapatan negara yang diperoleh dari pajak daerah menjadi salah satu elemen fundamental yang mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Sebagai salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerimaan pajak berperan penting dalam memperkuat otonomi daerah melalui pendanaan proyek-proyek infrastruktur, pelayanan publik, dan

pengembangan ekonomi lokal (Abdul Halim, 2012). Kabupaten Seruyan, yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, menghadapi tantangan besar dalam mengelola penerimaan pajak daerahnya di tengah perubahan dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi, terutama pasca pandemi COVID-19.

Ketentuan hukum yang menjadi landasan dalam pengaturan pajak daerah di Indonesia adalah “Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah” . Dalam regulasi ini, pajak daerah dikategorikan sebagai salah satu komponen utama dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Objek utama dari pajak daerah biasanya meliputi kategori pajak yang berwenang dipungut oleh pemerintah daerah sebagai sumber pendapatan bagi penyelenggaraan layanan publik dan pembangunan wilayah, seperti pajak kendaraan bermotor, pajak restoran, dan pajak lainnya. Regulasi ini menjadi pijakan utama dalam mendukung pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan efisiensi.

Kebijakan pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia, yang mulai diterapkan pada tahun 2001 memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah di wilayahnya masing – masing dalam menjalankan strategi pengelolaan sumber daya keuangan mereka, termasuk pajak daerah. Setelah itu, satu tahun sesudah Otonomi Daerah diberlakukan Kabupaten Seruyan didirikan, tepatnya tanggal 2 juli 2002. “Berdasarkan UU No.5 Tahun 2002 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kotawaringin Timur” . Dalam konteks ini, kebijakan otonomi daerah dirancang untuk memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat lokal (Dahlia and Tiawon, 2019). Pajak daerah menjadi salah satu instrumen fiskal utama dalam mendukung pelaksanaan kebijakan ini. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah Kabupaten Seruyan memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk menggali potensi pajak daerah secara mandiri.

Kabupaten Seruyan, sebagai salah satu daerah otonom di Kalimantan Tengah, memiliki potensi pajak daerah yang signifikan, terutama dalam sektor pariwisata dan ekonomi lokal. Dengan luas wilayah yang mencakup banyak destinasi wisata dan didukung oleh pertumbuhan sektor jasa, Kabupaten Seruyan memiliki peluang besar untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui optimalisasi potensi lokal. Namun, tantangan seperti inflasi, tingkat kemiskinan, dan dinamika jumlah penduduk menjadi faktor yang memengaruhi capaian penerimaan pajak daerah. Selama periode 2011 hingga 2024, dampak pandemi COVID-19 memberikan tekanan besar terhadap ekonomi lokal, sehingga memengaruhi realisasi pajak daerah. Oleh karena itu, diperlukan analisis komprehensif untuk memahami bagaimana berbagai faktor ini saling berinteraksi dan memengaruhi penerimaan pajak daerah.

Penelitian-penelitian sebelumnya memberikan gambaran yang beragam berbagai determinan yang berkontribusi terhadap tingkat penerimaan pajak dalam suatu daerah. Sejumlah penelitian mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan positif yang signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak dan di sisi lain, inflasi sering kali dianggap memiliki pengaruh negatif

karena dapat menurunkan daya beli masyarakat (Haniz and Sasana, 2013). Variabel lain seperti tingkat kemiskinan, jumlah penduduk, dan jumlah wisatawan juga menunjukkan hasil yang bervariasi, tergantung pada konteks dan karakteristik daerah yang diteliti. Maka dari itu, penelitian ini berusaha mengisi celah pengetahuan dengan menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor apa saja yang memengaruhi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, menggunakan metode regresi untuk memberikan hasil yang valid dan objektif.

Pajak Daerah

Pajak daerah menjadi elemen penting dalam struktur perpajakan, berperan dalam mendukung penerimaan negara dan daerah serta keberlanjutan pembangunan wilayah di Indonesia dengan tujuan utama untuk menyajikan sumber pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah berfungsi dalam memberikan dukungan terhadap implementasi otonomi daerah secara efektif. “Menurut teori ekonomi publik, pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara atau pemerintah daerah berdasarkan aturan perundang-undangan, tanpa memperoleh imbalan langsung, dengan tujuan utama untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik” (Edwin R.A. Slegman 2009). Dalam konteks pajak daerah, pembayaran pajak tidak hanya menjadi kewajiban masyarakat lokal tetapi juga menjadi cerminan partisipasi mereka dalam mendukung pembangunan di wilayah masing-masing.

Regulasi yang menjadi landasan hukum dalam pengaturan pajak daerah di Indonesia adalah “Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”. Pajak daerah didefinisikan sebagai pajak yang diberlakukan oleh pemerintah daerah berfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan utama, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, kepada individu atau badan usaha yang memiliki kewajiban perpajakan. Objek pajak daerah mencakup berbagai sektor, termasuk pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak restoran, pajak bumi dan bangunan, serta pajak parkir. Pajak daerah berperan dalam dua fungsi utama: sebagai alat fiskal untuk meningkatkan pendapatan daerah dan sebagai alat regulasi yang dapat digunakan untuk memengaruhi perilaku ekonomi masyarakat (Nastiti, 2015).

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator fundamental yang menggambarkan secara jelas peningkatan kapasitas suatu wilayah dalam memproduksi barang dan jasa, secara efisien serta berkelanjutan dari waktu ke waktu. Sebagai salah satu variabel kunci dalam studi ekonomi regional, pertumbuhan ekonomi tidak hanya berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat tetapi juga memiliki hubungan erat dengan penerimaan pajak daerah (Sukimo, 1994). “Dalam konteks teori ekonomi, pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai peningkatan nilai produk domestik bruto (PDB) atau produk domestik regional bruto (PDRB) yang mencerminkan aktivitas ekonomi suatu wilayah” (Tarigan Robinson, 2008).

Inflasi

Inflasi adalah gejala ekonomi yang memengaruhi stabilitas harga serta daya beli masyarakat dalam suatu paling mendasar dan sering terjadi, mencerminkan kenaikan umum antara jumlah uang yang beredar dan terus-menerus dari harga barang dan jasa dalam suatu perekonomian. “Menurut Keynes inflasi dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis berdasarkan penyebabnya, seperti cost-push inflation, yang disebabkan oleh peningkatan biaya produksi, dan demand-pull inflation, yang dipicu oleh lonjakan permintaan agregat” .

Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan salah satu aspek yang dapat digunakan sebagai indikator utama yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat di dalam suatu konteks daerah atau wilayah. “Menurut Mudrajat Kuncoro (2000) kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana individu atau kelompok masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan” . Konsep ini mengakar kuat dalam berbagai studi ekonomi dan sosial, sebab kemiskinan tidak sekadar fenomena ekonomi tetapi juga mencerminkan ketimpangan sosial dan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya (Maipita, 2013).

Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk merupakan sebagai indikator utama dalam mengukur dinamika populasi suatu wilayah, jumlah penduduk tidak hanya mencerminkan kapasitas sumber daya manusia tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk konsumsi, produksi, dan penerimaan pajak daerah. Jumlah penduduk sering kali menjadi fokus dalam analisis ekonomi karena pertumbuhan atau penurunan populasi memiliki implikasi langsung terhadap aktivitas sosial dan ekonomi, yang berujung pada dampak terhadap kebijakan fiskal (Febryanti, 2023).

Jumlah Wisatawan

Jumlah wisatawan atau pariwisata menjadi salah satu faktor utama yang mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi di sektor jasa, khususnya dalam industri pariwisata. Pariwisata tidak hanya memberikan dampak langsung terhadap pendapatan lokal tetapi juga memiliki efek multiplay yang signifikan terhadap sektor-sektor terkait seperti transportasi, akomodasi, kuliner, dan hiburan (Dahlia and Harin Tiawon, 2019). Dengan demikian, jumlah wisatawan dapat dianggap sebagai salah satu penggerak utama ekonomi daerah, terutama di daerah yang memiliki wisata pantai dan alam yang berpotensi besar seperti Kabupaten Seruyan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif sebagai metode utama. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah time series dalam kurun waktu 14 tahun (Januari 2011 - Desember 2024) dengan metode regresi linier berganda untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi

penerimaan pajak daerah di Kabupaten Seruyan. Sebelum menggunakan metode regresi linier berganda akan terlebih dahulu menggunakan uji asumsi klasik, dipilih karena memastikan model regresi tidak bias dan valid (Ghozali, 2018). Data Penelitian ialah sekunder yang bersumber dari BPS dan Disporaparbud kab.Seruyan. Selain itu, didapatkan data sebanyak 84 dari beberapa variabel, yaitu:

Metode Analisis

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam analisis ini, ialah:

1. Memberikan gambaran mengenai variabel-variabel Y, X₁, X₂, X₃, X₄, dan X₅.
2. Analisis menggunakan *software ibm spss 27* untuk mengolah data.
3. Melakukan *uji asumsi klasik* diperlukan untuk memastikan apakah metode regresi yang diterapkan pada penelitian ini memenuhi kriteria yang baik. Uji tersebut meliputi: “*uji normalitas, uji multi kolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi*” .
4. Melakukan analisis regresi linear berganda, meliputi “*uji signifikansi T (Parsial), uji signifikansi F (Silmutan), dan koefisien determinasi (R²)*” .

Tabel 1. Daftar Variabel & Operasional

No	Variabel	Definisi	Indikator
1.	Penerimaan Pajak Daerah (Y)	Pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah berperan dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah secara optimal.	Rupiah (Rp)
2.	Pertumbuhan Ekonomi (X1)	Indikator fundamental yang mencerminkan penguatan kemampuan suatu wilayah dalam memproduksi barang dan jasa secara lebih optimal.	Persen (%)
3.	Inflasi (X2)	Fenomena ekonomi yang terjadi mencerminkan kenaikan umum antara jumlah uang yang beredar dan terus-menerus dari harga barang/jasa.	Persen (%)
4.	Tingkat kemiskinan (X3)	Indikator utama yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah/Daerah.	Persen (%)
5.	Jumlah penduduk (X4)	Indikator utama dalam mengukur dinamika populasi suatu wilayah.	Jiwa (orang)
6.	Jumlah wisatawan (X5)	Indikator penting yang mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi di sektor jasa, khususnya dalam industri pariwisata.	Jiwa (orang)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Penelitian

Penjelasan mengenai data penelitian terkait Penerimaan Pajak Daerah disimbolkan dengan (Y), Pertumbuhan ekonomi (X1), Inflasi (X2), Tingkat kemiskinan (X3), Jumlah penduduk (X4), dan Jumlah wisatawan (X5).

Tabel 2. Data Penelitian

THN	Y	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅
2011	13.680.000.000	4,82	3,6	8,82	142.275	22.512
2012	1.760.000.000	5,16	4,96	7,92	146.914	19.302
2013	2.890.000.000	6,28	7,25	8,77	160.600	24.371
2014	5.530.000.000	5,31	7,9	8,39	167.622	34.289
2015	7.960.000.000	5,17	5,72	8,5	174.859	42.168
2016	7.470.000.000	5,12	2,46	8,08	182.307	43.395
2017	60.040.000.000	5,18	3,29	7,46	189.975	45.010
2018	46.850.000.000	5,21	6,02	7,43	197.839	46.601
2019	32.510.000.000	5,09	2,02	7,19	148.230	29.922
2020	16.400.000.000	-2,23	1,62	6,85	162.180	19.164
2021	23.340.000.000	2,12	4,62	7,22	165.220	24.134
2022	14.380.000.000	4,01	5,99	7,43	168.260	22.139
2023	16.640.000.000	4,44	2,56	7,12	171.310	17.490
2024	15.530.000.000	3,04	1,18	7,08	174.320	29.679

Sumber: Data BPS dan Disporaparbud kab.Seruyan, 2025

Data penelitian ini tidak hanya sekadar angka, tetapi jejak sejarah yang menunjukkan bagaimana kebijakan, peristiwa lokal, dan dinamika lokal telah membentuk ekonomi dan kehidupan masyarakat Kabupaten Seruyan selama lebih dari satu dekade.

Tabel 3. Hasil deskripsi statistik

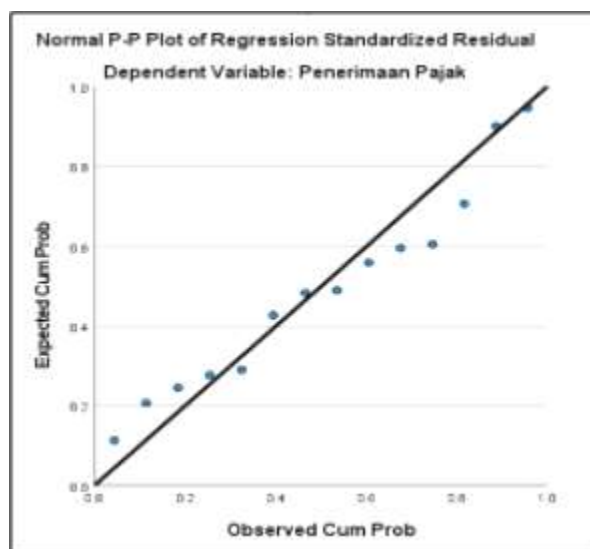
Descriptive Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
Penerimaan Pajak	18927142857.14	16934752356.106	14
Pertumbuhan Ekonomi	4.1943	2.12195	14
Inflasi	4.2279	2.14829	14
Tingkat Kemiskinan	7.7329	.66969	14
Jumlah Penduduk	167993.64	15859.285	14
Jumlah Wisatawan	30012.57	10448.442	14

Berdasarkan Tabel 3, bahwa kontribusi nilai rata-rata atau mean untuk variabel Y adalah 18927142857,14. Sementara itu, nilai mean untuk variabel X1 adalah 4,1943; variabel X2 memiliki nilai mean sebesar 4,2279; variabel X3 menunjukkan nilai mean 7,7329; variabel X4 memiliki rata-rata sebesar 167.993,64; dan variabel X5 tercatat dengan nilai mean sebesar 30.012,57.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Berdasarkan Gambar 1, terlihat prob. plot membentuk pola garis lurus. Selain itu, hasil normalitas ini menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov, pada tabel 4 mengindikasikan bahwa data mengikuti distribusi normal, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,200, yang lebih besar dari 5%. Artinya, hasil ini mengindikasikan bahwa uji asumsi normalitas pada model regresi tersebut terpenuhi, yakni :



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Tabel 4. Hasil One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		14
Normal Parameters	Mean	.0000150
	Std. Deviation	.11110768438
Most Extreme Differences	Absolute	.152
	Positive	.152
	Negative	-.092
Test Statistic		.152
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^a

2. Uji Multi Kolinieritas

Hasil uji multikolinieritas dalam tabel 5 menunjukkan, pada variabel yang dianalisis memiliki tingkat toleranc yang beragam, mencerminkan hubungan antarvariabel dalam model. Pertumbuhan Ekonomi (X_1) menunjukkan nilai toleransi sebesar 0,521, diikuti oleh Inflasi (X_2) dengan 0,534, yang mengindikasikan hubungan yang tidak terlalu erat dengan variabel lainnya. Sementara itu, Tingkat Kemiskinan (X_3) memiliki toleransi lebih rendah, yaitu 0,349, mengisyaratkan adanya korelasi yang lebih kuat dalam sistem. Jumlah Penduduk (X_4) dan Jumlah Wisatawan (X_5) mencatat toleransi masing-masing sebesar 0,270 dan 0,277, yang menandakan bahwa kedua faktor ini berpotensi memiliki hubungan yang lebih kompleks dengan variabel lainnya.

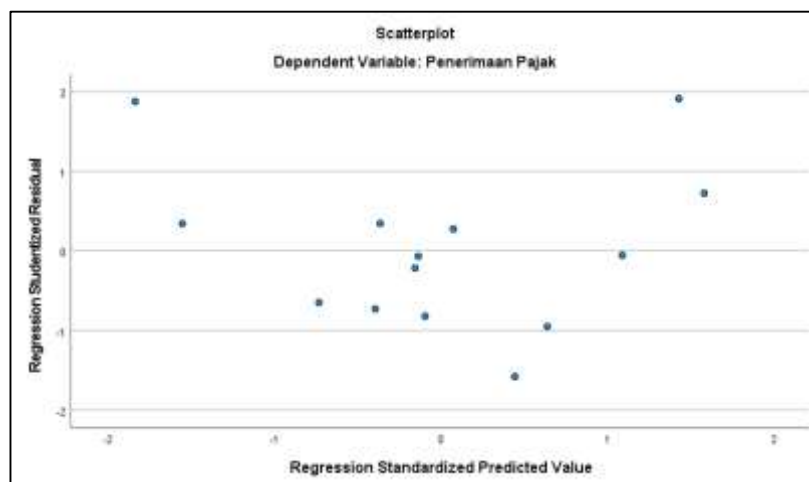
Tabel 5. Hasil Uji Multi Kolinieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pertumbuhan Ekonomi	.521	1.919

	Inflasi	.534	1.871
	Tingkat Kemiskinan	.349	2.865
	Jumlah Penduduk	.270	3.705
	Jumlah Wisatawan	.277	3.615

Berdasarkan hasil perhitungan, VIF untuk setiap variabel menunjukkan angka yang masih berada dalam batas toleransi. Pertumbuhan Ekonomi (X_1) memiliki nilai VIF sebesar 1,919, sementara Inflasi (X_2) mencatat angka 1,871, yang keduanya menunjukkan hubungan yang cukup moderat dengan variabel lainnya. Tingkat Kemiskinan (X_3) memiliki VIF lebih tinggi, yaitu 2,865, menandakan pengaruh yang lebih kuat dalam model regresi. Adapun Jumlah Penduduk (X_4) dan Jumlah Wisatawan (X_5) mencatat VIF masing-masing 3,705 dan 3,615, menunjukkan keterkaitan yang lebih signifikan dengan variabel lain. Dengan seluruh nilai tolerance yang tetap berada di atas 0,10 serta nilai VIF di bawah ambang batas 10, dapat diartikan bahwa model ini tidak mengalami masalah multikolinieritas, sehingga hubungan antarvariabel tetap dapat dianalisis secara valid tanpa adanya gangguan dari korelasi yang terlalu tinggi.

3. Uji Heteroskedastisitas



Gambar. 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dalam memperoleh heterokedastisitas menggunakan metode scatterplot, hasil yang diperoleh menunjukkan pola sebaran yang tidak teratur. Ketika titik-titik data tersebar secara merata dan acak di sekitar sumbu X dan Y, tanpa membentuk pola khusus yang terstruktur, hal ini dapat diartikan bahwa variabel dalam model tidak mengalami heterokedastisitas. Dengan kata lain, varians residual bersifat konstan di seluruh rentang data, memastikan bahwa model regresi yang digunakan tetap valid dan bebas dari gangguan akibat perbedaan variabilitas error.

4. Uji Auto Korelasi

Tabel 6. Hasil Uji Auto Korelasi

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.755 ^a	.570	.301	14163506270.255	1.918

Merujuk pada hasil analisis yang telah dilakukan dalam tabel, nilai Durbin Watson tercatat sebesar 1,918. Dengan mempertimbangkan batasan yang telah ditetapkan, di mana nilai DW berada di antara DL (0,505) dan 4-DU (1,705), dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi autokorelasi maupun non-autokorelasi secara jelas. Ketidakpastian dalam hasil ini menunjukkan bahwa asumsi klasik mengenai nonautokorelasi tidak adanya kesimpulan, sehingga model regresi memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan keandalan analisis yang dilakukan. Oleh karena itu selanjutnya dapat dilakukan pengujian menggunakan Run Test, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi Runs Test

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-452349790.33
Cases < Test Value	7
Cases >= Test Value	7
Total Cases	14
Number of Runs	6
Z	-.835
Asymp. Sig. (2-tailed)	.404

Karena hasil uji autokorelasi menunjukkan ketidakpastian dengan kategori “tidak dapat disimpulkan”, maka pendekatan alternatif yang dapat diterapkan dalam analisis ini adalah Runs Test. Dalam metode ini, jika nilai Asymp. Sig yang diperoleh lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak mengalami autokorelasi. Berdasarkan hasil Runs Test, model regresi yang diuji memenuhi asumsi bebas autokorelasi, sehingga analisis yang dilakukan tetap valid tanpa adanya pola hubungan sistematis antar residual.

Analisis Regresi Berganda

Rumus persamaan yang diterapkan dalam analisis ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n + e$$

Sebuah formula matematis yang menggambarkan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti, sehingga memberikan dasar perhitungan yang dapat digunakan dalam interpretasi hasil.

Persamaan ini menjadi alat penting dalam mengidentifikasi pola hubungan serta memastikan model yang digunakan memberikan hasil yang akurat dan sesuai dengan kondisi data yang dianalisis.

Tabel 8. Hasil Analisis Regresi Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	152529325249.15	117558941225.02		1.297	.231		
	Pertumbuhan Ekonomi	1621079004.45	2564370873.38	.203	.632	.545	.521	1.919
	Inflasi	335188276.98	2501176049.90	.043	.134	.897	.534	1.871
	Tingkat Kemiskinan	-18950259209.86	9928848245.57	-.749	-1.909	.093	.349	2.865
	Jumlah Penduduk	-152672.54	476747.04	-.143	-.320	.757	.270	3.705
	Jumlah Wisatawan	1011878.84	714786.05	.624	1.416	.195	.277	3.615

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil estimasi regresi linier berganda, diperoleh suatu model persamaan yang merepresentasikan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Persamaan ini berfungsi sebagai alat untuk memahami pola interaksi serta tingkat pengaruh masing-masing variabel dalam analisis yang dilakukan, yakni :

$$Y = 152529325249,15 + 1621079004,45X_1 + 335188276,98X_2 - 18950259209,86X_3 - 152672,54X_4 + 1011878,84X_5 + e$$

Keterangan :

- Y = Penerimaan Pajak
- X₁ = Pertumbuhan Ekonomi
- X₂ = Inflasi
- X₃ = Tingkat Kemiskinan
- X₄ = Jumlah Penduduk
- X₅ = Jumlah Wisatawan
- e = Error

1. Uji signifikansi T (Parsial)

Hasil uji t pada Tabel 8. mengindikasikan bahwa hubungan antara variabel X dan Y bergantung pada nilai signifikansi serta perbandingan t hitung dengan t tabel. Jika nilai signifikansi $< 5\%$ dan t hitung lebih besar dari t tabel (2,306), maka variabel X memiliki pengaruh terhadap Y. Sebaliknya, jika nilai signifikansi $> 5\%$ dan t hitung lebih kecil dari t tabel, maka variabel X tidak memiliki pengaruh signifikan. Dalam hal ini, Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai signifikansi 0,545 dan t hitung 0,632, yang lebih kecil dari t tabel, menandakan bahwa faktor ini tidak berdampak langsung pada penerimaan pajak daerah Seruyan. Demikian pula, variabel Inflasi dengan nilai signifikansi 0,897 dan t hitung 0,134 tidak menunjukkan hubungan signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Tingkat Kemiskinan, meskipun memiliki nilai 0,093, tetap tidak berpengaruh karena t hitung (-1,909) lebih kecil dari t tabel. Hal serupa terjadi pada variabel Jumlah Penduduk, dengan nilai 0,757 dan t hitung (-0,320), yang tidak memberikan kontribusi nyata dalam penerimaan pajak daerah. Jumlah Wisatawan, meskipun memiliki t hitung 1,416, tetap tidak berpengaruh karena nilai signifikansi 0,195 lebih besar dari batas 0,05.

2. Uji Signifikansi F (Silmutan)

Tabel 9. Hasil Uji signifikansi F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2123376606773841 500000.0	5	424675321354768 300000.0	2.117	.165 ^b
	Residual	1604839278940446 000000.0	8	200604909867555 750000.0		
	Total	3728215885714287 500000.0	13			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X5, X2, X1, X3, X4

Berdasarkan hasil uji signifikansi F, pada Tabel 9 diperoleh nilai F-hitung sebesar 2,117 dengan tingkat signifikansi 0,165, yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel “Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Tingkat Kemiskinan, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Wisatawan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah”. Dengan demikian, meskipun variabel-variabel tersebut mungkin berperan dalam dinamika ekonomi secara keseluruhan, dalam konteks model regresi ini, dampaknya terhadap Penerimaan Pajak Daerah di kabupaten Seruyan tidak cukup kuat untuk dianggap sebagai faktor penentu utama.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.755 ^a	.570	.301	14163506270.25511	1.918

a. Predictors: (Constant), X5, X2, X1, X3, X4

b. Dependent Variable: Y

Koefisien determinasi, yang direpresentasikan oleh nilai R Square, menunjukkan 0,570 mengindikasikan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Tingkat Kemiskinan, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Wisatawan memiliki kontribusi yang cukup baik pada Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Seruyan, dengan relevansi sebesar 57,0%. Sementara itu, 43,0% dari variabilitas penerimaan pajak masih terpengaruh oleh variabel lain yang berada di luar cakupan model yang diteliti.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis data pada penelitian ini time series dalam kurun waktu 14 tahun (Januari 2011 - Desember 2024), dengan metode regresi linier berganda dalam rangka mengevaluasi berbagai aspek yang memengaruhi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Seruyan. Hasil uji t dan uji signifikansi F memberikan gambaran mengenai hubungan antara variabel ekonomi dan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Seruyan. Berdasarkan analisis, nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dan t hitung lebih kecil dari t tabel (2,306) untuk seluruh variabel yang diuji, termasuk Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Tingkat Kemiskinan, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Wisatawan, menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Kondisi ini selaras dengan hasil uji F, di mana nilai F-hitung sebesar 2,117 dengan tingkat signifikansi 0,165 mengonfirmasi bahwa model regresi ini tidak menunjukkan pengaruh yang cukup kuat dari variabel independen terhadap Penerimaan Pajak. Sementara itu, nilai R Square sebesar 0,570 mengindikasikan bahwa variabel-variabel yang diuji berkontribusi 57,0% terhadap penerimaan pajak daerah, sementara 43,0% masih dipengaruhi oleh faktor lain yang berada di luar cakupan model yang diteliti.

Artinya, analisis ini menunjukkan bahwa meskipun variabel yang diambil dalam model ini tidak memberikan pengaruh terhadap Penerimaan Pajak di Kabupaten Seruyan, akan tetapi masih terdapat faktor eksternal yang berperan dalam menentukan fluktuasi penerimaan pajak di Kabupaten Seruyan. Dinamika ini juga dapat dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi, perubahan tren investasi, serta pergerakan fiskal daerah, yang menjadi aspek penting dalam pemahaman lebih lanjut mengenai mekanisme pajak dan faktor-faktor yang membentuknya.

Berdasarkan temuan penelitian, pemerintah daerah Kabupaten Seruyan perlu mempertimbangkan strategi yang lebih komprehensif dalam optimalisasi penerimaan pajak. Mengingat variabel ekonomi yang diuji tidak memiliki pengaruh signifikan, pendekatan kebijakan fiskal harus difokuskan pada faktor eksternal yang lebih dinamis, seperti kebijakan investasi, pengelolaan sektor pariwisata yang berkerja sama dengan UMKM lokal, upaya meningkatkan IPM berbagai daerah, serta program pemberdayaan ekonomi lokal. Pemerintah dapat mengembangkan insentif bagi pelaku usaha, meningkatkan transparansi dalam administrasi perpajakan, serta memperkuat regulasi yang mendorong kepatuhan wajib pajak. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap faktor sosial yang berkontribusi pada penerimaan pajak, termasuk pola konsumsi masyarakat dan mobilitas ekonomi. Dengan mengintegrasikan pendekatan berbasis kebijakan yang responsif terhadap dinamika ekonomi dan sosial, dengan begitu Kabupaten Seruyan dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih stabil, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perubahan kondisi makroekonomi.

REFERENSI

- Lumy, D. G., Kindangen, P., & Engka, D. S. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(2).
- Saputra, A. A. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Cilegon.
- Syahputra, R. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 1(2), 183-191.
- Amalia, F., Sinaga, R., Soeyatno, R. F., Silitonga, D., Solikin, A., Hubbansyah, A. K., ... & Ladjin, N. (2022). *Ekonomi Pembangunan*. Penerbit Widina.
- Bululung, W., Prang, J. D., & Mongi, C. E. (2021). Analisis Regresi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Manado Sulawesi Utara. *D\Cartesian: Jurnal Matematika Dan Aplikasi*, 10(2), 40-46.
- Simbolon, S., & Herijawati, E. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tangerang. *Rubinstein*, 1(2), 52-62.
- Azizah, S. N., Jamaludin, M., & Nariyah, K. (2024). Analisis Pengaruh Pdrb Riil Dan Inflasi Terhadap Pengangguran Di Kota Serang. *Magisma: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 115-123.
- Se, H. A. R. A. (2017). *Ekonomi Pembangunan*. Penerbit Andi.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.
- Pasaribu, F. F. M., Raysharie, P. I., Takari, D., & Hukom, A. (2023). Kajian Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Seruyan. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif*, 1(2), 243-256.

- Dahlia, D., & Tiawon, H. (2019). Analysis Of Regional Acceptance Potentials From The Tourism Sector In West Kotawaringin, East Kotawaringin, And Palangka Raya City. *Journal Magister Ilmu Ekonomi Universtas Palangka Raya: Growth*, 5(2), 96-110.
- Widati, T. (2023). Perancangan Resort Di Pantai Seruyan Dengan Tema The Art Of Doing Nothing. *Jurnal Perspektif Arsitektur*, 18(2), 45-60.
- Utami, M. W. (2018). Pengaruh Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Tingkat Kemiskinan Di Kalimantan Tengah.
- Sugiyono, D. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.
- Arafat, L., & Rindayati, W. (2018). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 7(2), 140-158.
- Tobias, B. C., Kristianto, T. W., & Lertariono, W. (2021). Strategi Pengembangan Pariwisata Di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Pandemi Covid-19. *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin*, 8(1), 221-234.
- Widjaja, H. A. W. (2007). Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom.
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149-163.
- Ristanti, Y. D., & Handoyo, E. (2017). Undang-Undang Otonomi Daerah Dan Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Rak (Riset Akuntansi Keuangan)*, 2(1), 115-122.
- Janie, D. N. A. (2012). Statistik Deskriptif & Regresi Linier Berganda Dengan Spss. *Jurnal*, April, 52.
- Haniz, Nadya Fazriana, And Hadi Sasana. 2013. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tegal." *Diponegoro Journal Of Economics* 3(1):1-13.